

Judul : Usulkan RUU Keuangan Haji, DPR sepakat perkuat tata kelola dana haji
Tanggal : Minggu, 15 Maret 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Usulkan RUU Keuangan Haji

DPR Sepakat Perkuat Tata Kelola Dana Haji

Senayan segera menggarap RUU Keuangan Haji yang ditetapkan sebagai usul inisiatif DPR dalam Rapat Paripurna, Kamis lalu. Aturan ini memperkuat tata kelola dana haji. Pemerintah diminta segera menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).

WAKIL Ketua Komisi VIII sekaligus Ketua Panja RUU Keuangan Haji Abidin Fikri mengatakan, persetujuan ini merupakan hasil dari proses harmonisasi mendalam di Badan Legislasi (Baleg) DPR. Proses ini melibatkan seluruh fraksi dan menandai komitmen kuat untuk memperkuat tata kelola dana haji. Karena itu, Abidin menyambut baik langkah sangat bersejarah ini. Pasalnya, RUU ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi, keadilan, dan proporsionalitas dalam distribusi manfaat bagi jemaah haji. "Ini sesuai dengan dinamika terkini penyelenggaraan ibadah haji," ucapnya, kemarin.

Pengelolaan dana haji yang lebih akuntabel, lanjutnya, akan memastikan azas keadilan terpenuhi, sehingga mencegah dugaan dan prasangka ketidakadilan yang selama ini dikeluhkan jemaah. Persetujuan di paripurna menjadikan ini sebagai prioritas legislasi

nasional. Karena itu, Pemerintah harus segera menyiapkan DIM untuk dibahas bersama.

Abidin menambahkan, Komisi VIII mendorong percepatan pembahasan agar RUU ini segera disahkan jadi UU. "Langkah itu harus dilakukan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik, transparan, serta berkeadilan bagi seluruh umat Islam yang ada di Indonesia," tegasnya.

Sejalan dengan itu, Ketua DPR Puan Maharani menjelaskan sejumlah norma baru dalam RUU ini. Pertama, terkait skema setoran angsuran haji. Lewat sistem itu, jemaah bisa mengangsur biaya selama masa tunggu keberangkatan, sehingga diharapkan mampu meringankan beban finansial saat memasuki tahapan pelunasan.

Menurut Puan, skema angsuran juga berpotensi meningkatkan dana yang dikelola BPKH. Dengan demikian, nilai manfaat yang dihasilkan



Abidin Fikri

dari pengelolaan dana itu turut meningkat secara signifikan. Sehingga memberikan dampak positif bagi keberlanjutan pembiayaan ibadah haji bagi seluruh jemaah Indonesia ke depan.

Selanjutnya, RUU ini juga mengatur soal pembentukan cadangan modal yang bersumber dari sisa operasional penyelenggaraan ibadah haji. Cadangan modal itu diperlukan BPKH sebagai penyangga jika terjadi risiko investasi. "Cadangan modal juga bisa diajukan pada DPR untuk dipergunakan sebagai modal investasi langsung," terangnya.

Puan menambahkan, norma itu dirumuskan untuk menopang

portofolio investasi BPKH. Pasalnya, portofolio itu tidak hanya ditempatkan pada instrumen penempatan dana atau deposito saja, melainkan juga diarahkan pada skema investasi langsung guna mengoptimalkan hasil pengelolaan dana haji bagi seluruh jemaah.

Berikutnya, regulasi ini juga mengatur distribusi Nilai Manfaat (NM) bagi jemaah berdasar asas keadilan dan proporsional. Makin lama jemaah menunggu, maka NM yang diterima akan semakin besar. "Akumulasi setoran angsuran akan meningkatkan perolehan NM pada Virtual Account masing-masing jemaah," terangnya.

Di aturan ini, BPKH juga diberi kewenangan membentuk usaha atau anak usaha untuk memperluas portofolio investasi. Baik di dalam negeri maupun di Saudi, khususnya pada bidang ekosistem haji dan umrah. Selain itu, BPKH juga akan terlibat dalam pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Dengan demikian, sambunginya, BPKH tidak lagi hanya berperan sebagai juru bayar atau *cashier*. BPKH juga akan ikut merumuskan besaran BPIH bersama DPR dan Pemerintah. Nantinya, BPIH yang ditetapkan tiap tahun juga

akan mempertimbangkan keberlanjutan dana haji yang dikelola dan berada di BPKH.

Usai pengesahan sebagai usul inisiatif DPR, kata Puan, pimpinan akan menyampaikan surat kepada Presiden, serta mengirimkan RUU itu beserta naskah akademik untuk dibahas bersama Pemerintah. "Diharapkan Presiden segera menunjuk menteri yang akan mewakili Pemerintah dalam tahap pembahasan pada masa sidang berikutnya," jelasnya.

RUU Keuangan Haji dianggap sebagai momentum penting bagi BPKH untuk memperkuat tata kelola sekaligus memperluas fleksibilitas investasi. Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah mengatakan, sinergi dengan Danantara jadi bagian penting dalam membangun kekuatan investasi nasional yang terintegrasi di tingkat global.

Menurutnya, anak usaha BPKH di Arab Saudi akan jadi platform kolaboratif bagi BUMN maupun swasta nasional. Platform ini memfasilitasi peran mereka agar masuk secara terstruktur ke ekosistem haji dan umrah. "Inisiatif itu bertujuan memperkuat daya saing pelaku usaha nasional di sana,"

penegas Fadlul. ■ **PYB**